
SESSION C1

“Preserving Strategic Autonomy in Indonesia’s Foreign Policy: It’s Not That Simple, It’s Not That Easy”

Middle Power Room – Conference on Indonesian Foreign Policy 2024

Pembicara:

1. **Letnan Jenderal TNI (Purn) A.M. Putranto**, Kepala Staf Presiden Republik Indonesia
2. **Dr. Rizal Sukma**, Senior Fellow at CSIS; Ambassador of Indonesia to the U.K., Ireland, and the International Maritime Organization (IMO) (2016-2020)
3. **Prof. Hikmahanto Juwana, S.H. LL.M., Ph.D.**, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia dan Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani
4. **Dr. Evan A. Laksmana**, Senior Fellow for Southeast Asia Military Modernisation, International Institute for Strategic Studies (IISS)

Moderator: Andini Wening Tyas Effendi, Jurnalis Independen

Andini Wening Tyas Effendi

We will have hopefully a fruitful and insightful discussion. Dan langsung saja saya undang para *speakers* untuk sesi ini. Yang pertama adalah Letnan Jenderal TNI (Purn) Hilman Hadi. Silakan Pak Hilman bergabung bersama saya di sini Pak. Pak Hilman adalah Deputi Bidang Politik Hukum Pertahanan Keamanan dari Kantor Staf Kepresidenan.

Andini Wening Tyas Effendi

Silakan di sini ada Dr. Rizal Sukma, Senior Fellow CSIS Indonesia, Ambassador Indonesia untuk the International Maritime Organization, 2016-2020. Ada Prof. Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia dan Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani. *Last but not least, my old friend* Dr. A. Evan Laksamana. Senior Fellow for Southeast Asia Military Modernization dari International Institute for Strategic Studies.

Andini Wening Tyas Effendi

Oke, kita akan bahas soal *Preserving Strategic Autonomy* dalam kebijakan luar negeri Indonesia yang dikatakan kalau menurut judulnya di sini *It’s Not That Simple, It’s Not That Easy*. Apakah betul tidak se-mudah itu dan tidak se-simple itu. Saya ingin bertanya kepada masing-masing narasumber kalau saya bertanya mengenai otonomi strategis singkat saja paling maksimal 1 menit deh saya kasih kesempatan dari Evan sampai Pak Hilman menurut Bapak-Bapak apa sih sebenarnya otonomi strategis itu dan seperti apa idealnya untuk Indonesia?

Dr. Evan A. Laksmana

Terima kasih kalau disuruh kasih jawaban singkatnya adalah *basically the right to be wrong*. Kita berhak untuk menentukan apapun kepentingan kita sesuai dengan kepentingan kita tanpa ada intervensi dari pihak eksternal. *Including the right to do wrong*. Jadi, *certain things* yang kita anggap *important* adalah *the freedom of maneuvering space* untuk *make our diplomatic decision and choices is within our right*. Yang repot adalah kalau kita ngomong ideal, kita sering mencampur adukan antara otonomi strategis sebagai tujuan sama sebagai *means to an end*.

Dr. Evan A. Laksmana

Karena itu dua hal yang berbeda. Seringkali kita melihat otonomi strategis sebagai sesuatu yang mau kita capai, tapi kita nggak tahu, kita capai itu untuk apa. Jadi kalau saya secara ideal sebetulnya otonomi strategis secara ideal adalah *it's a means to an end*, tapi apa *ends*-nya itu yang kita harus lebih *specify*. *So, it's not the goal in itself, it's a mean to an end*.

Andini Wening Tyas Effendi

Oke, *so it's a process of itself*. Prof. Hikma, silakan.

Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D.

Karena satu menit, tiga aja yang ingin saya sampaikan. Pertama adalah harus punya prinsip. Prinsip itu yang kita harus pertahankan. Kedua, tidak transaksional. Dan yang ketiga, tentunya kita harus patuh dalam *maneuvering* dengan kebijakan yang selama ini ada dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, karena yang terakhir ini saya ingin sampaikan bahwa yang namanya politisi keluar dan masuk. Di Indonesia, politisi itu hidupnya paling lama 10 tahun oleh karena itu harus mendengarkan apa yang disampaikan oleh birokrasi dan harus sesuai dengan koridor yang ada di dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional.

Andini Wening Tyas Effendi

Seperti layaknya orang hukum harus berada di koridor peraturan perundang-undangan. Silakan, Ambassador Sukma.

Dr. Rizal Sukma

Terima kasih boleh setuju nggak sama Evan?

Andini Wening Tyas Effendi

Boleh dong, *of course, you can echo*.

Dr. Rizal Sukma

Kalau definisi akademisnya ya itu. *Well anyway*, buat saya *strategic autonomy is the ability of nations to avoid entrapment on one hand and abandonment on the other*. Jadi *basically option* untuk meng-*create* kondisi yang membuat kita tidak akan pernah terjebak ataupun dijebak oleh *other external power* maupun juga dicuekin dibiarkan dan dicampakkan oleh negara yang lain oleh karena itu *the choice that we have* mau nggak mau suka tidak suka ya tetap apa yang

bebas aktif itu. Sekarang masalahnya seperti dikatakan Evan, *how you define it?* Itu yang pertama yang saya pahami *strategic autonomy* yang kedua ya tentu selaras dengan bebas aktif itu sendiri ya, *it's the ability* dari sebuah negara untuk menentukan apa sih yang menjadi kepentingan kita serta aktif dan juga bebas untuk memilih *means* ataupun sarana alat yang disampaikan untuk mencapai *national interest* tadi. Jadi dua dimensi itu yang menurut saya perlu ditekankan ketika kita ingin membangun *strategic autonomy*. *It's basically a freedom*, bisa dalam pengertian apa *freedom to decide what is best for us* ataupun *freedom not to decide what is best for us*.

Andini Wening Tyas Effendi

Oke, jadi kembali lagi tadi kata Evan *the right to be wrong* sebenarnya ya *bisa decide or not to decide*. *It's a process, no? Both*. Oke, Pak Hilman, silakan.

Letnan Jenderal TNI (Purn) Hilman Hadi

Terima kasih, Mbak. Dan para hadirin sekalian, ini pertanyaan yang menarik. Tentunya menjawab sesuai dengan *background* pengalaman dan pendidikan, terutama saya sebagai militer tentunya. Kalau kita melihat apa yang dikatakan otonomi strategis, kita melihat bahwa negara kita ini negara besar dan memiliki kemampuan, kekuatan, dan memiliki sumber daya nasional yang sangat luar biasa, sehingga kita punya hak untuk mempertahankan kepentingan kita dengan sumber daya yang besar ini. Terutama adalah bagaimana kita melindungi kepentingan kita dalam rangka mencapai tujuan negara kita yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di paragraf 4 bahwa Indonesia harus mampu secara mandiri mencapai tujuan nasionalnya dengan melindungi kepentingan nasionalnya dengan memanfaatkan sumber daya nasional yang ada. Kalau kita bicara sumber daya nasional maka ada tiga hal, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

Letnan Jenderal TNI (Purn) Hilman Hadi

Sumber daya buatan adalah semua seperti jalan tol dan lain-lain, sehingga sumber daya nasional yang kita miliki ini harus memiliki kapasitas, memiliki posisi tawar yang besar. Sehingga kita berani harus secara mandiri, tetapi ya tidak terlepas tadi kalau kita bicara bebas aktif, kita juga bukan berarti independen murni, kita juga harus interdependensi dengan politik luar negeri kita bebas aktif. Demikian Mbak.

Andini Wening Tyas Effendi

Oke, kalau kita ngomongin soal otonomi strategis, terus juga ada bagaimana kita bisa *hedging* ketika kita bernegosiasi. Kita kembali ke tanggal 9 November, masih ingat apa yang terjadi pada saat itu? Dimana pada saat itu Presiden Prabowo sedang melakukan kunjungan kenegaraan ke Tiongkok. Dan yang menjadi *headline* di tanah air adalah soal *joint statement* antara Indonesia dengan Tiongkok. *Now, I want all speakers to be undiplomatic for this answer. Just to be unfiltered in front of the public. What do you think about that joint statement? And is it the right strategy for hedging* untuk Indonesia?

Andini Wening Tyas Effendi

Ini saya buka kesempatannya kepada seluruh narasumber silahkan untuk berdiskusi. Saya pengen membuka. Karena Prof. Hikma yang sudah kasih *statement* di media *so maybe you can go head*, Prof.

Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D.

Ini dia, susah sekali. Jadi teman-teman sekalian pada waktu tanggal 9 November, *joint statement* itu dibuat, sebenarnya saya mendengar sebelum ada pelantikan oleh Pak Prabowo bahwa akan ada ide *joint development*. Kedua, saya berpesan kepada teman-teman di Kemenlu untuk punya prinsip. Kita tidak mengakui 9 garis putus dan katanya itu oke semua. Kemudian *joint statement* muncul, saya terus terang terkejut. Tanggal 9 November, 10 November saya dapat *press release*-nya, saya siap untuk membuat *press release* dari saya. Saya harus konsultasi sama ayah saya, karena saya menganggap bahwa ini masalah yang sangat berat yang berdampak pada diri saya.

Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D.

Ayah saya katakan sebagai seorang akademisi, kalau kamu harus menyampaikan apa yang benar sampaikan. Bahwa ada resiko setiap orang harus bisa menanggung resiko itu.

Andini Wening Tyas Effendi

Apa sih Prof resikonya? Biar kita tahu saja.

Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D.

Ya, kita tahu Bapak Presiden baru dipilih dan pasti saya yakin banyak yang mendukung dengan ide-ide baru beliau. Saya katakan, saya tidak punya masalah dengan ide-ide baru, tetapi kalau itu sudah bermanuver dalam kebijakan yang selama ini Indonesia lakukan, berbahaya. Jangan lihat Hikmahanto-nya saja, kalau Hikmahanto udahlah, kriminalkan saja, saya bersedia masuk penjara. Tapi saya ingatkan bahwa soal 9 garis putus ini dampaknya adalah ke negara-negara kawasan, bahkan Amerika Serikat dan negara-negara lain Karena saya katakan kita harus punya prinsip. Kalau prinsip kita tidak pernah mengakui 9 garis putus sesuai dengan putusan dari Mahkamah Arbitrase Internasional pada tahun 2016, harusnya itu tetap kita jalankan.

Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D.

Saya tadi katakan bahwa politisi, presiden, menteri dan lain sebagainya *come and go*, keluar dan masuk, tetapi yang memastikan bahwa kebijakan kita tetap adalah birokrasi. Ingat Barack Obama, pada waktu kampanye dia ingin agar Guantanamo Bay ditutup. Delapan tahun beliau menjadi presiden, Guantanamo Bay tidak pernah ditutup. Birokrasi bukan mendikte, birokrasi adalah yang memastikan kebijakan dari suatu negara tetap. Oleh karena itu, pada waktu itu saya katakan, oke saya pertanyakan apa yang dimaksud dengan *overlapping claims*. Karena dalam perspektif saya dan selama ini Indonesia selalu mengatakan kita tidak pernah punya *overlapping claims* dengan Cina. Lalu buat apa kita melakukan *joint development*?

Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D.

Kalau kita tidak punya *overlapping claim*, berarti hak berdaulat kita, baik di zona ekonomi eksklusif dan *continental self* adalah eksklusif untuk negara pantai sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UNCLOS. Itu yang saya keluarkan pada waktu itu *press release*. Saya tahu Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Banyak yang mengatakan pada saya, tuh kan kamu ini terlalu berlebihan. Saya katakan tidak.

Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D.

Saya yakin teman-teman di Kementerian Luar Negeri banyak yang berterima kasih dengan *press release* saya itu. Karena kalau tidak ada *press release* itu, apa dasar Kementerian Luar Negeri membuat klarifikasi dan menyampaikan kepada dunia? Tidak ada. Saya bersedia jadi martir untuk kebesaran Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan pada waktu Bapak Presiden datang ke Amerika Serikat, kita tahu.

Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D.

Coba dilihat di *Joint Statement* Paragraf 25. Di situ dikatakan bahwa mengenai masalah hak berdaulat harus sesuai dengan hukum internasional yang terefleksi dalam UNCLOS. Bahkan di situ juga para pemimpin menyebutkan, *take notes* dari PCA tahun 2016. Ini yang kita harus hati-hati. Jangan sampai kita menjalankan *strategic autonomy* dengan mengatakan, kalau di sini kita oke, kalau di sana kita oke di sana.

Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D.

Eenggak. Kita harus punya prinsip. Itu yang *message* yang ingin saya sampaikan. Dan alhamdulillah Bapak Presiden, dalam wawancara *doorstop*, kita akan bekerja sama dengan siapapun negara besar. Tetapi kalau sudah bicara kedaulatan, tidak ada mengorbankan kedaulatan. Jadi itu *message* yang ingin saya sampaikan, termasuk baru-baru ini, mohon maaf, berkaitan dengan akan dipindahkan narapidana dari Filipina, Mary Jane.

Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D.

Ada ide seperti itu, saya lihat aturan. Maka saya katakan, boleh kita bermanuver tapi lihat aturan yang ada di Indonesia. Di Indonesia disebutkan kalau ada pemindahan narapidana maka harus ada Undang-Undangnya pemindahan narapidana yang sampai hari ini Indonesia belum punya dan harus ada perjanjian pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Pemasyarakatan. Saya tidak punya masalah, Bapak Presiden punya diskresi, tetapi semua itu harus didasarkan pada kebijakan yang selama ini ada dan kedaulatan kita, kedaulatan hukum. Kira-kira itu yang ingin saya sampaikan.

Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D.

Terima kasih.

Andini Wening Tyas Effendi

Mungkin Pak Hilman boleh ngasih penjelasannya dari perspektif KSP seperti apa terkait tadi dua hal itu?

Letnan Jenderal TNI (Purn) Hilman Hadi

Terima kasih. Ini sangat menarik sekali. Kebetulan saya punya grup, grup di senior saya juga, itu mulai ada bintang empat dan lain semuanya. Semuanya punya perspektif dan kebetulan saya juga pernah menjadi diplomat. Saya atase pertahanan di Filipina pada saat itu dan saya juga punya grup dari perspektif diplomat.

Letnan Jenderal TNI (Purn) Hilman Hadi

Saya juga punya grup beberapa grup dari *military observer* karena saya dua kali di UN Mission di Irak Kuwait Mission, kemudian *in* UNMIL dari mereka perspektif ini sangat luar biasa. Kemudian saya coba menyimpulkan saya konsultasi ada salah satu tulisan. Saya aneh juga ini tulisan itu dari Pak Puntu yang selama ini agak kontroversi tapi beliau menulis ini agak lebih objektif. Jadi kalau persepsi kita, kita melihat dan saya tahu persis Pak Prabowo waktu saya Deputy di Polhukam, beliau bagaimana tegas kerasnya pada saat itu untuk meningkatkan kemampuan militer kita. Pada saat itu Cina masuk di Laut Natuna Utara.

Letnan Jenderal TNI (Purn) Hilman Hadi

Beliau pada saat itu dengan tegas lugas dan saya duduk di situ. Dengan bersama menteri Menko Marves, beliau sangat luar biasa. Masalah kedaulatan tidak tawar menawar. Di situlah keyakinan saya bahwa beliau menandatangani ini dengan seluruh pertimbangan dan perspektif ini akan saya jelaskan sedikit. Kita melihat sejarah.

Letnan Jenderal TNI (Purn) Hilman Hadi

Seperti yang dijelaskan saya sangat setuju dari Profesor tadi, bahwa di bulan Mei, kita meningkatkan hubungan kerjasama kita dengan Amerika yang dikatakan dengan biasanya apa namanya hubungan yang tingkat strategis saja, Ya. *Strategic Partnership*. Dengan Amerika kita sudah pada *Comprehensive Strategic Partnership*. Itu hanya satu pola saja. Begitu

Letnan Jenderal TNI (Purn) Hilman Hadi

Begitu beliau berkunjung ke Cina, beliau meningkatkan inilah kita melihat ini adalah suatu bebas aktif kita. Ternyata beliau tidak hanya meningkatkan *strategic partnership*-nya Yang kita sebutkan kalau lebih tinggi di dalam hubungan internasional itu adalah *Comprehensive Strategic Partnership* bukan hanya kepada Amerika saja, begitu beliau berkunjung ke Cina juga, beliau menandatangani yang dikatakan *Comprehensive Strategic Partnership*. Berarti kita sudah berjalan pada posisi dengan politik luar negeri bebas aktif itu. Nah, diantara tanda tangannya adalah tentang masalah *joint* yang ini kebetulan saya pegang dan kepegang ini dan saya mencoba melihat di pasal 9 di paragraf tersebut yang selama ini menjadi diskusi besar *the two sides reach important common* dan lain-lain ini. Kemudian kalau kita melihat lebih detail tentang ini, ternyata selalu mereka mengatakan tentang *overlapping claim* inilah yang menjadi

diskusi besar di dalam pasal 9 di paragraf 3 ini, tapi kita melihat secara keseluruhan kalau kita bicara hukum di ujung dari paragraf itu adalah *pursuant to their respective prevailing laws and regulation*.

Letnan Jenderal TNI (Purn) Hilman Hadi

Jadi tidak ada mengganggu tentang kedaulatan kita. Tidak. Kita tetap mengacu kepada hukum kedaulatan kita. ZEE kita mengaku UNCLOS, ZEE 200 mil lepas pantai itu adalah kedaulatan kita, hak berdaulat kita, bukan kedaulatan ya, kita bukan bicara kedaulatan. Kalau kedaulatan kita, 12 mil.

Letnan Jenderal TNI (Purn) Hilman Hadi

Hak berdaulat kita 200 mil itu, itu bisa dikelola bersama dengan negara mana pun untuk demi keuntungan dan kepentingan bersama. Sehingga kalau saya melihat tanda tangan ini tidak ada berpengaruhnya tentang kedaulatan negara. Tapi memang perspektif dalam berbagai macam diskusi tentunya kita melihat dan perlu mendalam dan dari saya mendasar kepada pasal ini di paragraf tersebut bahwa tidak ada satupun yang mengganggu kedaulatan Indonesia. Tapi yang terpenting adalah bahwa beliau sudah *on track* di dalam mencelakakan politik luar negeri kita bebas aktif dengan meningkatkan *comprehensive strategic partnership* dengan negara Amerika dan sekarang mereka sebagai negara salah satu negara adidaya juga Cina Beliau meningkatkan dengan *comprehensive strategic partnership*. Saya kira dua hal yang lain. Walaupun tak langsung.

Andini Wening Tyas Effendi

Langsung setelah itu Kemlu ngasih keluarin rilis?

Letnan Jenderal TNI (Purn) Hilman Hadi

Ya, itu mungkin secara *political, politically, maybe they want to calm down the idea of the people*. Tapi saya sebagai *military*, Saya melihat bukan hanya *military*, Saya mantan diplomat, saya juga beberapa tugas di luar negeri dengan berbicara beberapa orang, saya melihat tidak ada mengancam satu kedaulatan pun. Ini Ini perspektif kita. Terima kasih.

Andini Wening Tyas Effendi

Aku mau dengerin dari Evan atau Ambassador Sukma, silakan. *What is your take on this?*

Dr. Evan A. Laksmana

Thank you, mungkin kalau soal hukumnya saya rasa Prof. Hik sudah bahas dengan sangat jelas, mungkin saya nambahin dari sisi strategisnya, karena kebetulan saat muncul saya lagi di Manila juga, saya dapat langsung *feedback* dari teman-teman Kemlu di Manila dan seterusnya. Dan memang secara strategis, terlepas daripada *acrobatic debate* mengenai hukumnya, *the genie's out of the bottle*, bahwa memang *it was a diplomatic win for China, period*. Yang Cina butuhkan bukan *actual joint development* ya, tapi *implicit acknowledgment* bahwa ada

overlapping claims. Soal bahwa kita dalam bentuk nanti *service contract* ataupun *joint venture*, itu urusan nanti. Dan buat Cina, *that's not the most important thing*.

Dr. Evan A. Laksmana

Buat Cina adalah *that overlapping claim issue*. Jadi dari sisi strategis, yang saya lihat reaksi dari temanteman di Manila maupun di Malaysia dan di Vietnam juga, itu memang mereka *concern*. Karena sekarang apakah ada posisi di mana kalau Indonesia mengakui '*There is such a thing as an overlapping claim*', dan kita misalnya mau meratifikasi, katakanlah, hasil negosiasi kita dengan Vietnam, yang masih belum diratifikasi, apakah nanti Cina bisa memveto? Kan '*you have an overlapping claim with me, and until you finalize your claim with me, you can not actually finalize with others* juga. *This is, I think, an issue* yang kita oke, memang ada semacam *damage control, we accept that*, tapi bahwa itu sudah *out of the back, I think* itu sudah harus diterima.

Dr. Evan A. Laksmana

Yang kedua, kalau berangkat dari apa yang tadi dikatakan sama Pak Deputi, saya rasa itu poin penting mengenai *pursuant to national laws and regulations*. *The problem is*, kalau kita lihat *national laws China, coast guard law* mereka, dan klaim-klaim mereka itu eksklusif. Dari mana kita juga bisa menerima bahwa kalau kita *follow pursuant domestic laws, it's gonna be a problem*, karena *their domestic laws excessive*. Makanya, kalau menurut teman-teman Kemlu, selalu yang dimasukkan adalah *pursuant to international laws, especially 1982 to UNCLOS*, bukan *pursuant to domestic laws and regulations*, karena itu nanti setiap negara akan berbeda-beda. So, ini saya rasa akan jadi masalah juga, karena kalau kita kembali ke *pursuant to national laws* juga.

Dr. Evan A. Laksmana

Undang-Undang No. 43 mengenai batas negara pun enggak ada disebut bahwa kita mempunyai *overlapping claim* dengan Cina. Ada kok list negara-negaranya PNG (Papua Nugini), Filipina, Singapura, Malaysia, dan seterusnya. Jadi, apakah kita juga berpotensi ber-*contradicting* dengan *our own domestic laws*? Itu juga menjadi sebuah pertanyaan. Tapi, *regardless* apa yang terjadi dan kenapa itu terjadi dan konsekuensinya, saya rasa *bigger point* dan ini kembali mengenai poin soal *hedging* tadi, adalah kita enggak bisa hidup di era di mana *hedging for hedging sake*.

Dr. Evan A. Laksmana

Sama kayak kita enggak bisa bilang pokoknya kita mempunyai hubungan baik sebagai ekspresi bebas aktif. Bebas aktif itu harus menjadi *means to an end*. Apa yang mau dicapai dengan *hedging*? Apa yang mau dicapai dengan bebas aktif? Bukan mencapai bebas aktif, mencapai *hedging* seolah-olah selesai.

Dr. Evan A. Laksmana

Nah ini yang saya rasa agak lebih sulit, karena *hedging for hedging sake* memang bisa. Saya mempunyai *strategic partnership* dengan negara X, dengan negara Y, A, B, C. Itu sebagai bukti

kita bebas aktif. Lalu hasilnya apa dari masing-masing engagement itu? Apa kepentingan yang kita *trade off*?

Dr. Evan A. Laksmana

Kalau kita berbuat ini, kekurangan ini, atau kelebihan itu, itu yang saya rasa harus diperdebatkan, bukan secara prinsip dan normatif sebagai filosofi landasan politik luar negeri, enggak ada yang memperdebatkan. Bebas aktif, *is important, it's who we are, who we have always been, and that's fine. Tapi the next question* adalah, *is it enough?* Dan ini susah karena kita hidup di era *strategic power competition*, di mana *hedging may not be sustainable*. Kalau sekarang kita bilang, oke, gua mau kerja sama militer sama Amerika, kerja sama ekonomi sama Cina, tapi gua juga mau beli Huawei, gua mau beli banyak hal dengan banyak negara.

Dr. Evan A. Laksmana

Dengan kompetisi antara US dengan Cina yang makin *cross domain, at some point*, nggak *sustainable* lagi, karena *at some point*, seperti kita lihat di CAATSA, seperti kita lihat soal *critical minerals*, US akan bilang, *actually*, no. Kalau lo mau kerja sama sama gue, lo nggak boleh kerja sama sama Cina di bidang X, Y, and Z. Apakah kita masih mau memaksakan *hedging*? Atau kita harus mengambil posisi *interest* dan *principle* yang sangat saya ditekankan, *Our principle is our interest*. Mereka bukan hal yang berbeda.

Dr. Evan A. Laksmana

So, saya rasa saya sangat setuju dengan Prof. Hik, kalau *principle UNCLOS itu our interest*, bagaimana kita membelanya? Bahwa kita harus untuk membela *international law*, saya rasa itu yang harus kita lakukan.

Andini Wening Tyas Effendi

Ambassador Sukma, gimana? Ini kan kayak sebenarnya *addressing the elephant in the room*. Dan akhirnya dibahas, dan akhirnya kita bisa berdiskusi soal ini, karena *there are things that needs to be negotiate, needs ada strategic* untuk *hedging* nya itu tapi *how do you see this? And And how do we move on from this?*

Dr. Rizal Sukma

Untung udah bukan ambassador lagi, yang paling pas untuk menjawab menjawab pertanyaan itu yang namanya Arif Havas Oegroseno dia wamenlu kok, jadi kita tunggu aja dia kembali dari Jerman nanti dia akan bicara soal ini tapi saya sebagai orang dari melihat dari luar memang banyak *overlap* pendapat saya dengan Profesor Hikmahanto dan juga dengan Evan tapi begini rumah saya itu akhirnya tuh dikeluarkan pada tahun 1997 oleh kantor BPN Tangerang Selatan itu ada halamannya kecil tiba-tiba tetangga saya bilang halaman lu tuh punya gua karena nenek moyang gua dulu tinggal di situ ini kan ada nah selama ini kita cuek aja nggak pernah merespon *joint statement basic* bilang Wah kita punya masalah nih itu loh ke tetangga itu daripada dunia itu karena dia mengklaim halaman kita nah tapi apakah dia mengklaim halaman kita berarti itu? Ya kita setuju halaman gua tuh punya lu kan belum tentu itu cara apa cara saya

melihatnya. Jadi kalau bahasa Inggrisnya gampang menjelaskan kalau bahasa Indonesia memang ruwet Pak. Bahasa Inggrisnya begini *we take note that **China claims** part of our EEZ within the northern part of the West Natuna water* jadi bukan *that* kita bilang *we take note that **Cina's claim** on the EEZ* tapi *we take note that **China claims*** jadi sama kayak anolgi tetangga itu tadi tetangga kita apa ngaku-ngaku halaman kita punya dia bukan kita mengakui bahwa tetangga kita itu punya halaman belakang rumah kita gitu, *there is nuance* disitu gitu ya tapi kalau menjelaskan pakai Bahasa Indonesia pusing sendiri Pak, muter sana muter sini apapun yang terjadi *problem* gitu.

Dr. Rizal Sukma

Jadi saya melihatnya ada perbedaan antara ***China claims** our EEZ* dengan ***China's claim** of the EEZ* gitu loh. Jadi *recognition* bahwa *we have a problem* tapi ada *political* konsekuensinya jadi ketika kita *recognize* ada *dispute* ada *problem*, kemudian Cina bisa ngomong oke *let's talk about it*. Dua *problem*. Pertama, *if we recognize there is a problem* kita nggak mau berbicara untuk menyelesaikan masalah itu kita yang kelihatan jelek itu satu. Kemudian yang kedua dalam konteks spesifik *overlapping claim* ini basis untuk ngomongnya apa? UNCLOS, dia kakak percaya kok sama UNCLOS, dia maunya yang *nine dotted line* jadi *we don't have a legal basis to solve that problem* Jadi ini yang muncul implikasi apa legal dan *political* nya itu di situ gitu loh. Itu yang jadi soal.

Andini Wening Tyas Effendi

Baik, boleh silakan Prof.

Letnan Jenderal TNI (Purn) Hilman Hadi

Sampaikan,

Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D.

kalau kita buat *joint statement* ada dua pihak, and it takes to to thank you kan gitu ya. Kita boleh di Indonesia mengatakan itu kan national legislation dan lain sebagainya. Tadi Mas Evan bilang, tapi di Cina juga dia bilang our national legislation. Yang kedua Cina pada waktu setelah tanggal 10 November, kalau tidak salah tanggal 11 November, juru bicara Kemenlu mengatakan kita siap untuk bernegosiasi dengan Indonesia terkait dengan join film, betul ya? Dan teman-teman saya yang bisa berbahasa Cina melihat naskah dari *joint statement* ini beda.

Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D.

Di situ ada *overlapping claims between two country, two states, mer country*, bahaya. Itu enggak diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Karena kalau dalam bahasa Inggris, saya dalam satu podcast dengan Pak Havas tadi disebut, Itu kan *overlapping claims*, plural. Maksudnya adalah, ya memang kan di sana ada Filipina yang bersengketa, Malaysia yang bersengketa. Walaupun saya katakan, ini kan *joint statement*, bilateral.

Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D.

Kita enggak bicara dong yang lain-lain. *Why should we?* Emang kita pegang *power of a turning* dari negara-negara tersebut? Kan enggak? Ini yang kita harus lihat perspektifnya.

Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D.

Dan dalam konteks hubungan internasional, *I'm not talking about* hukum internasional, *YET!* Karena memang ini bukan instrumen hukum. Tetapi, Tetapi, Cina bisa *men-declare* bahwa Indonesia sudah ada di belakang Cina dalam hal Laut Cina Selatan. Itu yang bahaya. Karena apa?

Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D.

Sejak zamannya Presiden dipegang oleh Den Xiaoping untuk memastikan negara-negara yang punya sengketa, Cina selalu *mem-propose joint development*. Dan negara yang bersengketa dengan Cina, Filipina, mereka sudah sampai pada satu titik pegang *taken joint development*, tapi enggak pernah direalisasikan. Maka di sini pemerintah selain tahu *policy* kebijakan lalu kemudian peraturan perundangundangan kalau bisa menyertakan para akademisi karena kamikami ini dari waktu ke waktu melakukan riset terkait berbagai masalah dan kami bisa memberikan masukan-masukan. Kalau kami ditinggal selesai, maka sindiran dari juru bicara Presiden Amerika Serikat kepada Indonesia, kalau Bapak Ibu lihat di *we encourage Indonesia to consult with their legal expert*. Saya bilang ngeledak.

Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D.

Jadi seola-holah kita mau dibenturkan antara para akademisi ini dengan kebijakan pemerintah. BapakIbu sekalian, seperti saya katakan tadi, ini bukan masalah nasional dengan Hikmahanto. Habisi saja Hikmahanto, enggak ada masalah. Tetapi, bagaimana posisi Indonesia *standing*-nya di kawasan maupun secara internasional.

Andini Wening Tyas Effendi

Pak Hilman, ayo diajak ngobrol ke gitu para akademisinya biar kelihatannya lebih Indonesia nih. Satu definisinya kompak gitu loh ketika narasinya.

Letnan Jenderal TNI (Purn) Hilman Hadi

Ini menarik sekali memang, nah memang saya kira itu hal yang sangat positif dan luar biasa. Kebetulan sebagai informasi boleh, Pak? Boleh

Andini Wening Tyas Effendi

Boleh dong silakan.

Letnan Jenderal TNI (Purn) Hilman Hadi

Kondisi KSP saat ini, hampir seluruh, sekarang ini kan kita seluruh kabinet yang ada, kementerian yang ada dalam proses transformasi organisasi, termasuk di dalamnya KSP karena ada beberapa fungsi KSP di dalamnya sudah diambil, sudah berpisah terutama dalam

komunikasi, itu sudah ada *we have our* ICO, kemudian investigasi juga, sehingga fungsi-fungsi yang ada sekarang ini dan saat ini juga kita dalam rangka mengisi secara organisasi. Nah ini saran ini saya kira dalam proses kita nanti dalam rangka 2025, perumusan-perumusan kebijakan yang kalau saya selalu mengatakan bahwa program pemerintah saat ini Indonesia Maju bersama bersama menuju Indonesia emas 2045 dengan visi misi Presiden ini yaitu 8 asta sita beliau, 17 program unggulan beliau, dan juga *quick win* yang saat ini yang menjadi andalan kita bersama yang perlu kita kawal. Nah, dalam proses ini nanti kita dalam menuju Indonesia Emas 2045 dan membahas masalah ini tentunya sangat terbuka kami dari KSP nanti pada forum-forum tertentu kita undang akademisi bagaimana perumusan yang terbaik dan ini saya kira saran yang sangat luar biasa. Terima kasih.

Andini Wening Tyas Effendi

Baik, ini kita pasti akan banyak yang ingin bertanya tapi saya mau bahas satu topik lagi karena tadi disebut oleh paman lu. Di mana Indonesia ini mau lebih aktif di forum-forum internasional bahkan Pak Menlu sendiri kan langsung dikirim ke Rusia ketika sudah dilantik, itu kayaknya menjadi salah satu prioritas utamanya. Mungkin saya tanya dari Ambassador dulu deh, melihat ini tadi balik lagi, *hedging for the sake of hedging* memang kita memang pengen nunjukin *our positioning* di sini dari kebijakan luar negerinya, silakan.

Dr. Rizal Sukma

Saya ngomong soal *hedging* dulu ya, saya enggak setuju dengan istilah *hedging*, meskipun itu salah satu opsi ya, ada *bandwagoning*, *balancing*, *hedging*, *fence-sitting*, tapi sebenarnya yang kita butuhkan itu bukan keempat itu, tapi justru *diversifying*. Jadi misalnya kalau *hedging* itu kan in case sesuatu yang buruk terjadi A, kita masih punya B, tapi kan kita harus invest di situ misalnya *do not put your egg in one basket, so it requires you have the egg first*. Ini belum tentu punya gitu jadi diversifikasi yang lebih penting dalam konteks ini, misalnya tujuannya itu sebenarnya dua. Yang pertama, *diversifying*, *strategic diversification*. Satu, bagaimana meng-*address heavy reliance on one particular source of the things that we need*. Yang kedua, yang lebih kritik lagi, *to address dependent* meskipun kita belum menjadi tergantung kepada salah satu *major power* ataupun *great power*.

Dr. Rizal Sukma

Misalnya banyak orang mengatakan Indonesia tergantung pada Cina itu saya kira berlebihan kita lihat misalnya dengan alasan hutang yang tinggi hutang kita kan baru 20% dari PDB dan itu kan masih apa hutang terhadap Cina pun masih di bawah itu jadi itu susah dibilang kita tergantung. Jadi kalau *reliance* ya tergantung sektornya juga. Nah Nah ini yang harus kita address untuk bisa memastikan *strategic autonomy* itu tadi. Itu yang pertama. Jadi Jadi yang kedua yang jadi masalah itu bukan apakah kita perlu atau boleh atau bisa menjadi anggota dari banyak organisasi ya persoalannya *the ability to participate* di sini kebetulan ada Pak Fitu, Pak Fitu ini korvung ekonomi saya waktu saya di London itu kan tiap tahun kan kita bayar tuh keanggotaan di banyak organisasi ya ada komunitas gula internasional, organisasi kopi internasional, organisasi maritim internasional, banyak sekali kita itu anggota mungkin lebih dari

100 sekian belas organisasi internasional sampai Presiden Jokowi pada waktu itu minta Kemlu mereview mana yang kita harus keluar yang enggak ada gunanya, enggak ada penting. Malah

Dr. Rizal Sukma

Malah kita juga anggota International Hanseve Association of *something*. Jadi ini jadi *problem* kalau kita mengukur bebas aktif dari keikutsertaan di anggota tadi jadi yang penting itu *the ability to participate to achieve work*, itu yang paling penting. Jadi bayar iuran aja udah setengah mati tuh kan, sering telat.

Andini Wening Tyas Effendi

Harus bayar itu ya Pak ya? Bayar.

Dr. Rizal Sukma

Bayar dong kangotan kan bayar, memangnya enggak bayar. Itu orang masuk *sport*, olahraga aja bayar kok. Kemampuan kita untuk *participate* itu terbatas *at the end*. *You have to choose* mana yang betul-betul apa bisa memenuhi kepentingan strategis kita, *that is very important* gitu buat saya ya, jadi bisa saja kita ikut apa CPTPP, kita ikut IPEF, kita ikut BRICS gitu ya apakah perlu juga kita AUKUS, ikut QUAD itu kan *that is not* atau FPDA, *but that is not the way you do foreign policy* gitu. *You choose which one* dari organisasi internasional yang betul-betul bisa *serve our national interest*.

Dr. Rizal Sukma

Kalau enggak ya keluar aja jangan masuk gitu loh. Jadi banyak organisasi-organisasi internasional yang udah nggak penting lagi buat kita kita masih bayar iuran terdaftar sebagai anggota. Saya termasuk yang waktu itu advokat ke Presiden Jokowi, Pak keluar aja dari sekian ratus kita anggota mungkin setengah tuh nggak ada gunanya gitu.

Andini Wening Tyas Effendi

Kalau Evan, menurut kamu gimana? *Do we have enough eggs in our basket to diversify?* ke OECD kan udah mau masuk, kemudian itu tadi BRICS, kemudian masih ada CPTPP, apakah kita udah cukup punya modal untuk diversifikasi ini?

Dr. Evan A. Laksmana

Nah sekarang ini menjadi pertanyaan yang fundamental juga, karena selama ini kan our *biggest egg so to speak* adalah ASEAN. Dan seperti yang tadi dibilang sama Pak Rizal, *resources* kita sangat terbatas, kita enggak bisa *give equal attention to every single platform*. Dan kalau memang kita serius sama ASEAN, *let's actually do that, let's focus on that*. Tapi Tapi kalau nggak, *and we want to the diversify, I think that's okay as a matter principle*, tapi kembali *to what ends*.

Dr. Evan A. Laksmana

Karena memang *multilateral platform, just like some bilateral platform, is useful for something and not for everything*. Nggak ada satu organisasi yang *useful for everything* buat *foreign policy*, itu yang pertama. Kedua, Di bidang-bidang tertentu, *over diversification* sebetulnya enggak bagus. Contoh, militer. *Overly diversified* dalam konteks supplier untuk alutsista, *actually not a good thing*.

Dr. Evan A. Laksmana

Kita bisa bilang di publik bahwa ini bukti kita punya otonomi strategis. Kenapa? tidak ada satu negara yang bisa memveto kita. *Sure*, kita punya 33 *foreign supplier* untuk alutsista, tapi as a *consequence*, trainingnya susah, *interoperability* susah, maintenancenya repot, kita harus mengoperasikan pesawat tempur dari enam negara yang berbeda, pilotnya latihnya juga berbeda-beda. Jadi kita harus hati-hati bahwa apa yang disebut dengan otonomi strategis *for the sake of strategic autonomy* itu sudah nggak lagi *sufficient*.

Dr. Evan A. Laksmana

Jadi, *on some part*, kuncinya memang betul, seperti yang Pak Rizal bilang tadi, bahwa *in terms of strategic partners, the more the merrier, as a matter principal, that's fine*. Tapi untuk *specific issues*, termasuk soal *defense*, *maybe not really the best thing* juga, kalau kita *overly diversify*.

Andini Wening Tyas Effendi

So, you got to pick and choose to put the right egg. Oke, saya buka kesempatan untuk bertanya. Oke silahkan masnya ada duluan, boleh berdiri. Namanya siapa, dari mana, dan ingin bertanya untuk siapa. Saya aja yang pegang microphone

Penanya 1

Terima kasih, nama saya Haikal. Saya dari Magister HI Universitas Indonesia. Saya mau nanya, *probably for all for thing to do bad, what is Indonesia's strategic interest? what is Indonesia's grand strategy? from all this alignment, all this participation in forum? because we are participating in so many things but we can not perceived what is the interest, main interest from all of this like that?*

Andini Wening Tyas Effendi

Mungkin *main interest* untuk *the current administration* kali ya. Ditariknya mungkin lebih terkininya. Mungkin Pak Hilman boleh jawab dulu Pak. Sebenarnya *strategic* utamanya itu apa sih dari pemerintahan Pak Prabowo saat ini? *In terms of foreign policy*, Tuhan.

Letnan Jenderal TNI (Purn) Hilman Hadi

Terima kasih, untuk *foreign policy* kita tetap mengacu, kalau kita melihat awal dari pemerintahan beliau. Beliau sudah berkeliling beberapa negara. Ini menunjukkan, walaupun beberapa rekan-rekan juga mengatakan masih *hammers*. *Hammers* itu masih galau melihat bagaimana akhirnya dia istilahnya menggunakan *Siri*, Pak, untuk menjawab keinginan beliau ini ke mana

kira-kira, tumbol-tumbol *Siri* masih yang diberikan itu karena mereka melihat Mas. Tapi kalau kita mengacu dengan apa yang beliau ambil langkah ini, sudah jelas arah kebijakan luar negeri kita adalah bagaimana kita tetap komitmen terhadap tujuan negara dan kepentingan nasional yang bisa dilindungi, yang kita harus lindungi. Prinsip bebas aktif ini yang tetap masih menjadi *platform* dalam pelaksanaan politik luar negeri kita dan tujuan luar negeri kita dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum, dan keamanan, dan lain-lain sesuai dengan tujuan negara Republik Indonesia. Dan ini kita melihat bahwa untuk mencapai politik luar negeri yang demikian, kita harus mampu mandiri terlebih dahulu. Maka beliau ada program sekarang yang dikatakan, kalau saya sebut *food estate* mungkin agak alergi, dengan lumbung pangan saat ini yang kita harapkan kita bisa mandiri dalam hal ini, termasuk juga bagaimana meningkatkan sumber daya manusia lebih awal dengan memberi makanan gizi yang baik kepada siswa lebih awal. Dan saya kira ini sudah melihat arah dan kalau memang yang lebih ingin membaca lagi yang saya sebut tadi 8 17 8 sebagai visi misi beliau, visi misi penelitian ini yang tertuang di dalam RPJPN. Terima kasih.

Andini Wening Tyas Effendi

Baik, oke Yosua dari Binus silakan langsung pertanyaannya. Mungkin untuk Evan atau Prof. Hik ya bisa jawab.

Penanya 2

Sebelumnya terima kasih. Saya ingin bertanya. Bagaimana Indonesia sebagai pihak yang terimbas paling sedikit, oleh *Nine-Dash Line* memposisikan diri sebagai salah satu anggota dan *founding father* ASEAN. Dimana ASEAN sendiri itu negara-negaranya kan yang terimbas oleh *Nine-Dash Line* itu jauh lebih banyak dan lebih pasif. Seperti misalnya Filipina, Vietnam, Malaysia, atau mungkin Brunei Darussalam. Bagaimana Indonesia memposisikan diri di konflik tersebut?. Pertanyaan kedua, apakah dengan Indonesia masuk atau tertarik masuk BRICS itu benar-benar akan mengubah posisi kita di LCS karena sebagaimana kita tahu sendiri, negara-negara di dalam BRICS memiliki *conflict of Interest*, di mana kami pun juga sedikit ragu apakah BRICS itu benar-benar efektif atau enggak.

Andini Wening Tyas Effendi

Baik, terima kasih Yosua, silakan kembali. Ini yang cocok menjawab mungkin Evan, Prof. Hik. Dr. Rizal? silahkan.

Dr. Evan A. Laksmana

Mungkin nanti spesifiknya harus profit ini untuk spesifik klaimnya. Mungkin dari sisi yang lebih luasnya, waktu saya di Manila itu, ada beberapa teman dari Kemlu Manila yang setengah bercanda bilang, "*well congratulations*, bahwa kalian sekarang udah jadi *claimant*, ya sudah lupakan semua *honest broker* itu, kalian aja langsung leading untuk COC process. Toh kalian juga udah *claimant* sekarang. Jadi *in a fundamental sense*, posisi kita pun di mata *claimant states*, di level ASEAN ya, memang mau nggak mau sudah berubah. Bahwa apakah memang Indonesia masih mampu menjadi *honest broker* yang berdasarkan prinsip bahwa Indonesia

enggak punya *overlapping claims* dengan Cina. So, itu satu *big question*. Pertanyaan besar keduanya adalah soal BRICS tadi, kalau saya sih *personally* ngerasa *we're making a big deal or BRICS*.

Dr. Evan A. Laksmana

It's not really doing anything. Secara konkret, secara practical, secara strategis, nggak ada apa-panya dari BRICS, nggak ada sekretariat, *new development bank can happen without BRICS anyway*. Jadi *we're making a big deal seolah-olah ini fundamentally reassess our foreign policy*. *Not really, it's not doing anything*. Jadi *in that sense*, bukan cuma Indonesia yang apply ke BRICS. Vietnam, Malaysia, and Thailand and *others*.

Dr. Evan A. Laksmana

So, in some sense, I personally don't think it's a big deal, we should not make a big deal out of it. Kalau kita mau keluar dari ASEAN, *that's a big deal*. Tapi kalau kita cuma mau masuk BRICS, *I don't think it's a big deal*. Tapi ini kembali ke pertanyaan mendasar tadi yang sebelumnya, *what is exactly our international interest?* karena sekarang kita, yang suka agak berbeda adalah definisi *national interest* seolah-olah harus domestik, *which is keren*.

Dr. Evan A. Laksmana

Seperti yang dibahas tadi, *'Foreign Policy begins at home'*, Tapi kita juga harus punya *international interest*, sesuatu yang terjadi di luar yang mempengaruhi kita di dalam, bukan hanya sebaliknya. So, buat saya 3 *international interest* ini yang harus menjadi ukuran. Yang pertama, *US-China Strategic Competition*. Kalau Indonesia hanya mau mendayung di antara dua karang, *circumnavigate, that's spectating. That's not actually shaping US Cina Strategic Competition*.

Dr. Evan A. Laksmana

Jadi kita sebenarnya nonton *US Cina competition, that's a big problem number 1. Number 2, UNCLOS*. Landasan negara kepulauan Indonesia tergantung dari seberapa kuatnya UNCLOS tetap dipertahankan. Kalau kita mengurangi sedikit saja efektivitas UNCLOS, maka keseluruhan UNCLOS akan *collapse* dan oleh sebab itu, seluruh dasar negara kepulauan kita pun juga akan *collapse*. *So it's a big international interest*.

Dr. Evan A. Laksmana

Yang ketiga adalah pecahnya negara-negara Asia Tenggara, terutama karena South Cina Sea. Ada yang saya sebut sebagai *'diplomatic decoupling'* antara Filipina, Vietnam, Indonesia, Malaysia, dan *to some extent* bahkan Singapura. *Gap* ini saya rasa sangat *real*. Saya waktu di Manila itu sangat kelihatan bahwa mereka merasa negara-negara ASEAN meninggalkan kita. Dan sebaliknya, negara-negara ASEAN merasa Filipina terlalu nekat dengan Amerika, dengan Cina.

Dr. Evan A. Laksmana

Tapi kalau negara-negara maritim *Southeast Asia* pecah, balik ke poin pertama dan kedua tadi, UNCLOS pecah, *strategic competition* akan memperburuk buat Indonesia. So kalau buat saya tiga *international interest* itu juga harus dipertimbangkan, *in addition to* yang tadi disampaikan mengenai lumbung pangan dan seterusnya. *Thank you.*

Andini Wening Tyas Effendi

Oke, Prof. Hik atau Dr. Rizal?

Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D.

I could not agree more dengan Pak Evan. Mas Evan sudah menyampaikan. Jadi intinya, imbasan dari *Nine-Dash Line* ini, kan selama ini kita tidak mengakui dan kita bisa berperan sebagai negara yang *on a speech broker*. Jadi kita buat workshop, kita menginisiasi mungkin *code of conduct* dan lain sebagainya, itu kita bisa lakukan. Tetapi dengan posisi sekarang ini, tentu negara-negara *claimant* juga tunggu dulu. Apakah ada perubahan sikap dari pemerintah Indonesia, walaupun kita sudah keras mengatakan bahwa tidak ada perubahan sikap, klarifikasi dari Kemlu, pernyataan dari Bapak Presiden. Bahkan kalau saya agak lebih tegas lagi. Saya bilang siapa yang menyampaikan ide itu kepada Bapak Presiden sebaiknya mengatakan bahwa ada keteledoran saya dan saya salah, mengundurkan diri.

Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D.

Kenapa? Karena kalau tidak sampai hari ini, Cina akan pegang *joint statement* itu. Dan itu yang membuat kita tidak bisa kembali ke posisi semula. Padahal posisi semula itu, semua sangat *grateful*. Saya katakan, kalau kita pegang prinsip ada yang diuntungkan syukur, ada yang dirugikan, *Sorry.*

Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D.

Tetapi kita pegang prinsip, kita tidak terombang-ambing, kita tidak dibawa sana dibawa ke sini Pak Dubes sudah mengatakan bahwa *“that’s not free and active foreign policy”* kalau kita diombang sana, di ambing sini, dan lain sebagainya, enggak. Kita prinsipnya adalah kita tidak mau dalam posisi yang harus ke kanan ke kiri, kita tahu kepentingan nasional kita. Kepentingan nasional kita itu apa? Bapak Presiden sudah menyampaikan di G20 bahwa saya dipilih di tengah-tengah kelaparan dari rakyat Indonesia. *So we have to address that issue* di Indonesia.

Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D.

Kalau kita kerja sama dengan negara-negara lain untuk diabdikan pada kepentingan nasional kita yang administrasi sekarang, pemerintahan sekarang, adalah *addressing* kelaparan, *addressing* kemiskinan, *addressing* korupsi, *addressing* masalah-masalah ketergantungan kita. Maka Bapak Presiden bilang, *“Self Sufficient!”*. Ini yang harus diterjemahkan oleh para birokrat kita. Harus mereka tahu bagaimana menerjemahkan keinginan dari Bapak Presiden. Jangan main seenak-enaknya saja.

Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D.

Tapi kalau Bapak Presiden mengatakan seperti ini, diberi! Bapak Presiden, mohon maaf kira-kira seperti ini ceritanya. Kalau kita akan bergeser ke sana ini maksudnya, ini akibatnya, itu harus kita lakukan. Para birokrat. Kami sebagai akademisi paling bisa ngomong di koran soal BRICS saya juga besarkan, tapi *that is together free lunch from our friendly diplomat* gitu kan, pasti mereka akan mengundang saya, “ayo makan siang, kita bicara apa nih ceritanya?”, ya kan? *That's the rule of the academician*. Tapi birokrat, mereka harus tegas. Ingat Bapak Ibu sekalian ya, Inggris Jepang punya sistem parlementer.

Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D.

Mereka menteri, perdana menteri bisa enam bulan sekali ganti, tetapi kebijakan selalu mereka pegang. Siapa yang memegang kebijakan itu? Para birokrat. Terima kasih.

Andini Wening Tyas Effendi

Terima kasih. Oke, tepuk tangannya dulu boleh. Ini ada dari lulusan Universitas Padjajaran HI namanya siapa tadi?

Penanya 3

Nestri Kak.

Andini Wening Tyas Effendi

Nestri mau bertanya dengan Ambassador Sukma, silahkan.

Penanya 3

Oke, terima kasih Kak. Sebenarnya setuju dengan *statement* bapak sebelumnya bahwasannya sebenarnya kita itu bisa untuk ambil langkah *exit* dari beberapa organisasi internasional. Bahkan dari POV saya sendiri saya juga setuju bahwasannya keutuhan Indonesia sekarang ini sebenarnya bukan hal yang perlu digembor-gemborkan karena ini masalah giliran sebenarnya kalau menurut saya pribadi. Cuma di bawah kepemimpinan era Prabowo ini sebenarnya organisasi internasional apa sebenarnya yang Indonesia harapkan dan *impactnya* seperti apa? Dan apa sih posisi yang Indonesia inginkan di bawah kepemimpinan Prabowo ini dalam politik luar negerinya sekarang ini?

Andini Wening Tyas Effendi

Baik, mungkin bukan organisasi ya, *club* kali ya. *The club, the league* yang Indonesia itu pengen masuknya yang mana? Terima kasih, silahkan.

Dr. Rizal Sukma

Itu pertanyaan bukan buat saya, mungkin Pak Prabowo mau apa saya enggak tahu. Jadi gini, saya mau respon soal BRICS tadi ya. BRICS itu sebenarnya bukan organisasi BRICS, itu bisa dianggap sebagai manifestasi dari suara yang merasa bahwa *the international order is not just, international order is obsolete, so you need you know something new*. Itu *basically* manifestasi

dari *viewers emerging power* meskipun di situ ada Rusia. Yang kedua saya setuju kita masuk BRICS, tapi *timingnya* mungkin tidak sekarang, karena apa? Karena BRICS ini sedang digunakan oleh beberapa negara, yang anggota BRICS, itu sebagai platform anti barat. Sementara kita tuh udah lewatlah apa masa-masa anti ini, anti itu, yang dibutuhkan itu adalah platform yang non Barat. Beda ya, *anti-west* dengan *non-west*. Nah ini yang *non-west* ini penting *to tell the G7*, “guys, the world is changing, we need to also register our voice and our position”. Dan *one of the platform yang available* buat kita ya BRICS, meskipun banyak platform yang lain. Indonesia kalau jadi kalau mengharapkan kerjasama ekonomi segala macam kayaknya terlalu jauh ya, dengan adanya ada *expansion membership* udah segala macam negara ada di situ. Ditambah lagi, nanti lama-lama ini jadi G77, jadi enggak efektif juga. Jadi *we’ve been there before*. Jadi jangan sampai kemudian masuk ke sebuah rumah yang benar tapi tujuannya mungkin tidak pas, bukan di situ. Karena kita sering bercanda di CSIS dulu, kalau mau kaya ya jangan main sama orang miskin terus, harus punya teman yang kaya juga supaya ada peluang untuk melakukan bisnis, kira-kira kan gitu.

Dr. Rizal Sukma

Jadi BRICS ini itu penting untuk menunjukkan ataupun *shape the new emerging international order* yang tidak lagi didominasi oleh G7. *That is I think very important*. Tapi mengharapkan kerjasama ekonomi nanti GDP kita bertambah dari keanggotaan BRICS *is too fun*. Nggak mungkin lah, *farfetch*, itu *is an illusion*. Kita dengan Cina udah bagus hubungan ekonominya, dengan beberapa member of BRICS juga sudah bagus. Menjadi anggota BRICS kemudian tidak membuat hubungan ekonomi itu tiba-tiba meroket. Itu yang soal BRICS. Saya ingin jawab juga soal Nine-Dash Line tadi, posisi kita gimana?

Dr. Rizal Sukma

Saya mau cerita soal pengalaman pribadi ini. Menjelang debat Presiden tahun 2014, Pak Jokowi tanya sama saya, “Pak Rizal bisa nggak jelaskan kepada saya dalam tiga kalimat apa sih persoalan di Laut Cina Selatan dan posisi kita dimana?” saya *come up* dengan formula begini. Pertama, Indonesia *is not a party to the dispute*. Kita tuh bukan pihak yang bertikai. Oke kalimat kedua, oleh karena itu kita bisa menjadi *honest broker*, mencoba untuk memfasilitasi pembicaraan antara Cina dengan ASEAN *claimant states* itu kalimat kedua. Kalimat ketiga kita akan terus mendorong COC. Dengan adanya kesepakatan baru ini, yang dua udah pasti nggak ada lagi. Jadi itu bukan posisi Indonesia. Yang ketiga ya tentu Pak Iman yang bisa menjawab apakah Indonesia masih terus mau untuk mendorong COC itu segera diselesaikan atau tidak. Pertanyaan dari depan tadi apa?

Andini Wening Tyas Effendi

Pertemanan mana nih, klub mana yang harusnya menjadi prioritas, itu tadi pertanyaan intinya sebenarnya.

Dr. Rizal Sukma

Kalau prioritas ya mau nggak mau memang ASEAN ya, tapi ASEAN ini kan udah bikin frustrasi orang banyak. Jadi kalau kita lihat survei-survei itu *slow* banget. *Even the public opinion of Asian is quite bad, it is very slow*, enggak responsif. Coba lihat hasil survei ISEAS tahun lalu. Nah Indonesia saya kira punya kesempatan, tadi Pak Dino juga menyampaikan di pidato beliau, direform ASEAN dan Indonesia sudah memulai ini sejak tahun 2018. Kita sudah *submitted* waktu KTT di Kamboja, itu konsep paper yang namanya *strengthening the capacity and institutional effectiveness of ASEAN* itu secara resmi sudah disampaikan oleh Indonesia. Kita tidak sampai kepada usul merevisi *charter*, tapi memperkuat kapasitas dan kelembagaan ASEAN. Ada beberapa usul dari Indonesia saya kira yang sangat bagus. Nah, ini butuh *new champion* dan saya berharap Presiden Prabowo mungkin bisa lebih tegas lagi untuk mendorong *if we want to be relevance, if we want to maintain Asian centrality, then Asian reform is imperative*. Kalau enggak ya enggak bisa, *that's the first organization* yang kita harus *pay attention to*. Yang kedua RCEP, ini bukan organisasi tapi adalah turunan dari ASEAN *initiative* dan untuk Indonesia juga.

Dr. Rizal Sukma

RCEP ini menurut saya itu satu-satunya kerjasama ekonomi yang memiliki *opportunity* dan prospek ini jauh lebih baik ketimbang yang lain. Saya udah nggak percaya dengan Global inisiatif, tapi kita lihat apa yang ada di kawasan, itu yang harus di fokus. RCEP *Indonesia's Initiative* zamannya Ibu Mari Pangestu sebagai menteri perdagangan. Sekarang kita harus *reclaim our leadership in order to push the RCEP to become the new economic platform* yang bisa meningkatkan GDP kita, meningkatkan ekspor kita, dan sebagainya. Karena *at the end*, jadi hubungan ekonomi di negara-negara Asia Pasifik, Indo Pacific ini yang lebih penting buat kita ketimbang menghayal misalnya G20 itu bisa meningkatkan GDP dan segala macam. Semuanya problem kok, *let's go* untuk fokusnya di kawasan. *We should be an Indo Pacific power with very selective global engagement*, itu paling tidak yang yang saya harapkan. Jadi nggak perlu menjadi *global power* dengan *selective regional engagement*, jangan dibalik. Jadi boleh aja kita ingin menyelesaikan masalah Ukraina segala macam, tapi itu kan nggak langsung berkaitan dengan kepentingan nasional kita.

Andini Wening Tyas Effendi

Baik, kita masih ada waktu untuk satu penanya lagi atau gimana? dari produser saya yang udah dari tadi nyolek-nyolek terus. Kenapa? Oh dari Pak Hilman, silakan Pak Hilman katanya untuk menanggapi. Kita masih ada waktu atau tidak pertanyaannya itu sudah selesai?

Letnan Jenderal TNI (Purn) Hilman Hadi

Rupanya dicatat tadi, memang saya merasa janggal tadi ada satu pertanyaan yang belum terjawab itu bagaimana sebenarnya arah dan lain-lain tentang masa kepresidenan. Pada prinsipnya, organisasi mana yang harus *full engagement* atau memang ada berdampak, itu tentunya perlu pengkajian panjang. Tapi secara umum roh ataupun value yang kita ambil, langkah-langkah yang diambil Presiden saat ini untuk engagement atau masuk dalam forum

apapun itu punya *impact* positif. Bagaimana nanti *impact* organisasi itu sendiri kita lihat. Tapi pada dasarnya melihat dari visi misi presiden yang ada saat ini, yaitu melanjutkan sudah lama yaitu terutama masalah kemandirian ini, kemandirian pangan, kemandirian energi, kemudian juga kita akan terus dalam rangka kemandirian ini kita sudah dilanjutkan dengan hilirisasi semua industri, kemudian juga beberapa program-program yang kembali kalau kita bicara normatifnya adalah kepada visi misi beliau silakan dilihat di 8 17 8. Tetapi satu hal dalam waktu dekat ini, kita akan ada forum penajaman program-program di seluruh Kementerian di Rakor dalam waktu dekat. Nah, saya nanti tentunya tadi sesuai saran akademisi pun bisa kita libatkan di dalam penajaman-penajaman program tersebut dan akan kita lihat sampai di mana pengaruh dari akademisi dalam mempertajam program-program Kementerian dan Lembaga dalam mencapai visi misi Presiden serta 17 program prioritas beliau. Terima Kasih

Andini Wening Tyas Effendi

Baik, Bapak tahan dulu *microphone* nya pegang aja untuk kalimat pemungkas. Jadi kalau kita ngomongin soal strategi otonomi, kalau dikatakan dalam judulnya itu tidak mudah dan tidak *simple* setelah perbincangan kita masih setuju, tidak mudah dan tidak *simple*?

Letnan Jenderal TNI (Purn) Hilman Hadi

Sangat setuju karena sangat kompleks, selain melindungi kepentingan kita sendiri juga ada banyak tantangan yang harus kita hadapi.

Andini Wening Tyas Effendi

Kalau Ambassador, *is it not that simple and not easy at all?*

Dr. Rizal Sukma

It's actually simple, tapi it's not easy. Simplenya dalam pengertian apa? *You define your strategic interest for the next five years, and 10 years.* Tapi *how you maintain strategic economy in order to achieve the national interest* itu yang tidak *easy*. Kalau itunya *simple*, yang mau dicapai.

Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D.

It's simple and it's easy. Dengan ketentuan, ada dengan ketentuannya. Kalau *lawyer* itu harus ada kaviatnya dengan ketentuan. Dengan ketentuan, pertama *you need to consult with your bureaucracy.* Ingat, Indonesia kehilangan Sipadan dan Ligitan karena pada waktu itu kepala pemerintahan kedua negara, Pak Harto dan Pak Mahathir, berbicara tanpa melibatkan Kemlu. Dan posisi Kemlu adalah jangan dibawa ke Mahkamah Internasional, tapi karena kesepakatan empat mata selesai. Timor Timor, Kemlu sedang bernegosiasi di New York tetapi keputusan tanpa konsultasi yang dalam dengan Kementerian Luar Negeri membuat teman teman kita di luar negeri terkaget kaget.

Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D.

Caught by surprises. Jadi consult the bureaucracy, jangan anggap mereka remeh, jangan mereka dianggap sebagai pendikte. Kita harus menjadi sebuah negara yang bisa mengapresiasi apa yang pernah dilakukan oleh para pendahulu kita. Jangan kita sebagai pendelum, ganti pemerintahan ganti kebijakan, rakyat yang bingung. Dan kalau kita merubah kebijakan dampaknya bisa dihitung dalam bentuk rupiah, bisa dihitung dalam bentuk sosialnya, bisa dihitung dalam lain-lainnya. Oleh karena itu, *consult the bureaucracy*.

Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D.

Kedua, harus taat pada peraturan perundang-undangan, hukum nasional kita. Karena dasar kita bisa bernegosiasi dengan negara lain adalah kita diharuskan untuk tunduk pada aturan kita. Dan ingat sumpah Bapak Presiden adalah, dan ini bagi pembantu Bapak Presiden harus juga diingatkan, “demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadanya memegang teguh undang-undang dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada bangsa dan bangsa. Jadi, *it's going to be easy and simple* kalau dua hal itu benar-benar ditaati. Terima kasih.

Dr. Evan A. Laksmana

It's definitely easy and simple in principle, it's the practice that neither both easy or simple.

Andini Wening Tyas Effendi

Very well, that's the perfect ending untuk diskusi kita terima kasih banyak, Bapak Ibu sekalian, temanteman yang sudah datang mohon maaf, tidak semua pertanyaan bisa kita akomodir, saya kembalikan ke MC, silahkan.